



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 April 2017

Halaman: 29

Pemkot Bisa Bertindak Tegas

Pecat Jukir Nakal

Dewan Usulkan Penggajian Juru Parkir dengan APBD

JOGJA - Juru parkir (jukir) nakal yang hobi *nuthuk* menjadi pembahasan serius Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perparkiran DPRD

Kota Jogja. Untuk menekan persoalan tersebut, Ketua Pansus Antonius Fokki Ardianto mengusulkan pembentukan jukir resmi di bawah komando pemerintah daerah. Artinya, jukir nantinya digaji menggunakan APBD. Bukan sekadar setor retribusi.

Menurut Fokki, hal itu lazim terjadi di kota-

kota besar lainnya. Bahkan, keberadaan jukir "pelat merah" dinilai bisa membantu pemerintah mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Para jukir akan terikat oleh pemerintah supaya menaati peraturan. Sehingga jika ada jukir nakal pemkot bisa bertindak tegas dengan pemecatan," ungkap Fokki kemarin (31/3).

Sebagaimana diketahui, kasus jukir nakal terus saja terjadi di Kota Jogja. Hal itu bukan saja mencoreng kota budaya ini. Lebih dari itu, keberadaan jukir *nuthuk* bisa mengancam daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Jogja.

Fokki lantas menukil kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Batam, yang telah melakukan

kebijakan penggajian jukir. "Hal itu efektif menekan kebocoran pendapatan daerah. Juga meminimalisasi jukir nakal," ujar politikus PDIP itu.

Lebih dari itu, lanjut Fokki, di Batam telah dikenakan parkir berlangganan. Pembayaran-nya *include* saat perpanjangan STNK. Pemda bekerjasama dengan kepolisian. (*pra/yog/rg*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005